

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Tesis)**

**MAMMARELLA RAMADHAN AL ISLAMI**

**NPM. 2126021008**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**MAMMARELLA RAMADHAN AL ISLAMI  
NPM. 2126021008**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Magister Ilmu Politik (M.Ip)**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh :**

**MAMMARELLA RAMADHAN AL ISLAMI**

Program Indonesia Pintar adalah program bantuan dari pemerintah di bidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Program Indonesia Pintar ini belum berjalan dengan maksimal karena masih adanya pemberian bantuan tidak tepat sasaran, masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap PIP. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ketidakefektifan implementasi kebijakan program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan empat aspek menurut teori George Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Birokrasi dan Disposisi). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar pada aspek komunikasi dalam bentuk sosialisasi antara Dinas Pendidikan dengan Sekolah yang telah dilakukan menunjukkan ketidakefektifan. Hambatan dalam masalah komunikasi yaitu masih terdapat wali murid yang belum memahami manfaat serta tata cara pengusulannya untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar. Sumberdaya baik pegawai maupun peralatan dalam mendukung Program Indonesia Pintar baik di Dinas Pendidikan maupun di Sekolah Bandar Lampung sudah berjalan meskipun masih kurang memadai. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas maupun sekolah terkait program ini telah dilaksanakan kepada para penerima manfaat Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung, namun pengawasan Sekolah terhadap penggunaan dana bantuan oleh siswa penerima Program Indonesia Pintar yang masih belum optimal dikarenakan pihak sekolah tidak mengetahui dengan pasti kegunaan dana tersebut digunakan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar telah terlaksana, namun juga masih terdapat kendala yaitu pihak sekolah masih kesulitan untuk mendata siswa siswa yang sangat membutuhkan program tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Program Indonesia Pintar

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE SMART INDONESIA PROGRAM IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG**

**By :**

**MAMMARELLA RAMADHAN AL ISLAMI**

The Smart Indonesia Program is an assistance program from the government in the field of education to meet educational needs. The Smart Indonesia Program has not been running optimally because the provision of assistance is still not on target, and parents' awareness of PIP is still low. The aim of this research is to determine the ineffectiveness of implementing the Smart Indonesia Program policy in Bandar Lampung City. Viewed from four aspects according to George Edward III's theory (Communication, Resources, Bureaucracy and Disposition). This research method uses a descriptive qualitative approach. Based on the research results, it shows that the implementation of the Smart Indonesia Program policy on the communication aspect in the form of socialization between the Education Department and Schools that has been carried out shows ineffectiveness. The obstacle in communication is that there are still parents who do not understand the benefits and procedures for proposing to get assistance from the Smart Indonesia Program. Resources, both staff and equipment, to support the Smart Indonesia Program both at the Education Department and at the Bandar Lampung School are already running, although they are still inadequate. Apart from that, the implementation of duties and functions from departments and schools related to this program has been carried out for the beneficiaries of the Smart Indonesia Program in Bandar Lampung City, however, the school's supervision of the use of aid funds by students receiving the Smart Indonesia Program is still not optimal because the school does not know with certainty what use the funds will be used for. While the implementation of the Smart Indonesia Program policy has been implemented, there are still obstacles, namely schools are still having difficulty registering students who really need the program.

**Kata Kunci :** Implementation, Smart Indonesia Program



Judul Tesis : **IMPELEMENTASI PROGRAM INDONESIA  
PINTAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Mammarella Ramadhan Al Islami**

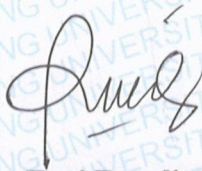
Nomor Pokok Mahasiswa : 2126021008

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP. 19690219 199403 2 001



**Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P.**  
NIP. 19780430 200812 1 001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP. 19690219 199403 2 001



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Syarief Makhya**

### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
NIP. 19610807 198703 2 001

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. R. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **8 Agustus 2024**



## PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Mammarella Ramadhan Al Islami

NPM.2126021008

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Januari 1999, yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Murnisyah Rusli PAM, SH. dan Ibu bernama Surtika RA, S.Pd. (Alm).

Penulis menempuh pendidikan Formal di SDN 2 Sukabumi tahun 2005-2011, SMP Negeri 29 Bandar Lampung tahun 2011-2014, dan SMA Negeri 12 Bandar Lampung tahun 2014-2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan strata satu pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017-2021. Setelahnya penulis melanjutkan Pascasarjana pada tempat yang sama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan kemudian di tahun yang sama pula penulis melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dengan konsentrasi Manajemen Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung 2021.

Pada tahun 2019 penulis pernah bekerja sebagai guru di lembaga pendidikan Smart Global Education, selanjutnya penulis bekerja sebagai Staff Advokasi PKBI Lampung dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Kemudian di awal tahun 2022 penulis mulai bekerja sebagai staf di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di tahun yang sama itu pula penulis mengajar sebagai guru bidang study PKN pada SMPN 8 Bandar Lampung, Menjadi asisten dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan juga tentor di lembaga kursus kedinasan FOKUS.



## **MOTTO**

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Percayalah, dari jatuh kita bisa dinaikkan, dari terpuruk kita bisa ditinggikan,  
dari akumulasi kesedihan mungkin kita bisa dibahagiakan.”

**(Penulis)**

"Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil  
untuk diselesaikan. Karena sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya,  
Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya."

**(QS. At Thalaq: 3)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau ridhai ya Allah langkah hambaMu,  
sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring shalawat kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam semoga  
kelak tesis ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat  
dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Kedua orang tua saya, Papahku Murnisyah Rusli Pam, SH. dan Mamahku Surtika  
RA, S.Pd. (Alm). yang tidak pernah berhenti menaruh harapan terhadap anak  
bungsunya ini. Saya begitu mencintai kalian selamanya;

Untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semoga Allah Subhanahu  
WaTa'ala senantiasa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat;

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana Magister  
Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan  
dari Allah Azza Wa Jalla.

Almamater yang peneliti cintai dan banggakan  
**Universitas Lampung**



## SANWACANA

Segala puji senantiasa terucap hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang mengangkat peradaban dari zaman jahiliah menuju zaman terang, ialah Baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'AlaihiWasallam . Telah terselesaikannya tesis yang menjadi penutup karya tulis penulis pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan Judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** bisa terselesaikan tanpa ada hambatan yang berarti.

Bukanlah sebagai pemenuhan prasyarat dalam meraih gelar semata hadirnya karya ini. Karya ini merupakan wujud riil penulis dalam melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian. Penulis berharap karya ini bisa jadi bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa Universitas Lampung.

Manusia adalah makhluk yang heterogen, karenanya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam mencapai tujuannya, tanpa bantuan itu manusia akan sulit mencapai apa yang ingin didapatkannya. Dengan ketulusan yang hadir dari hati ini, penulis berharap Allah Subhanahu WaTa'ala dapat membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu penulis berjuang menyelesaikan Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Utama yang telah banyak memberi masukan konsep, saran, dan kritikan yang sangat membangun dan berguna dalam penyusunan Tesis ini..
5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberi petunjuk penulisan, saran, dan kritikan yang sangat membangun dan berguna dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Prof. Syarief Makhya. sebagai penguji utama yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyusunan tesis ini.
7. Bapak Murnisyah Rusli PAM, SH. Dan Ibu Surtika Raden Ali, S.Pd., (Alm) yang telah menjadi papah dan mamah terbaik untukku terima kasih atas pengorbanan dan pelajaran hidup yang diberikan kepadaku.
8. Bapak Jaenudin dan Ibu Rosika serta aa Reza Eka Gumelar, A.Md.A.K. dan adinda Raisya Dwi Asriani yang turut mendoakan kelancaran dalam studiku.
9. Kakak kakakku, Marshall Desmonne Amazonika, S.E., S.Kom dan Inge Gudiana Anton, S.E ; Mattalia Clara Annalene, S.P dan M. Ariansyah, S.Kom ; Marcello Berialdo Arizonaka dan Arum Novira Surie S.Pd ; serta Messalinda A'laa Al-Medina, S.Sos. yang selalu menemani perjuangan ini.
10. Para Dosen Magister Ilmu Pemerintahan dan Staf/Karyawan di Sekretariat Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang banyak membantu.
11. Untuk seluruh rekan perjuangan Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 tanpa terkecuali. Serta untuk Mahasiswa Pembahas Tesis, Alfathan, Awan, Edwin yang telah mau berkontribusi memberikan saran.
12. Sahabat-sahabat terbaik Lydia, Fathan, Awan, Irma, Riska yang sudah menemani dalam perjuangan selama masa perkuliahan.
13. Kepada semua narasumber yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan yang terbaik bagi kita semua dan baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam memberikan syafaatnya di yaumul akhir, Aamiin.

Bandar Lampung, Juli 2024

Penulis

Mammarella Ramadhan Al Islami



## DAFTAR ISI

### Halaman

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b> | <b>i</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>SANWACANA.....</b>     | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b> | <b>viii</b> |

### **I. PENDAHULUAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang dan Masalah ..... | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah.....             | 16 |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....          | 15 |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....         | 17 |
| 1.4.1 Secara Teoritis .....          | 17 |
| 1.4.2 Secara Praktis .....           | 17 |

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 2.1 Implementasi Kebijakan .....                    | 19 |
| 2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan .....       | 19 |
| 2.1.2 Perspektif Implementasi Kebijakan Publik..... | 21 |
| 2.1.3 Studi Implementasi Kebijakan Publik .....     | 29 |
| 2.2 Kebijakan Pendidikan .....                      | 30 |
| 2.2.1 Pengertian Kebijakan .....                    | 30 |
| 2.2.2 Pengertian Pendidikan.....                    | 30 |
| 2.2.3 Proses Kebijakan Pendidikan .....             | 32 |
| 2.3 Implementasi Kebijakan Pendidikan.....          | 35 |
| 2.4 Program Indonesia Pintar .....                  | 38 |
| 2.4.1 Pengertian .....                              | 38 |
| 2.4.2 Dasar Hukum .....                             | 39 |
| 2.4.3 Tujuan .....                                  | 41 |
| 2.4.4 Sasaran .....                                 | 42 |
| 2.4.5 Pemanfaatan Dana.....                         | 42 |
| 2.5 Kerangka Pikir .....                            | 43 |

### **III. METODE PENELITIAN**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 3.1 Tipe Penelitian .....                      | 45 |
| 3.2 Fokus Penelitian.....                      | 46 |
| 3.3 Jenis Data.....                            | 49 |
| 3.4 Tempat dan Waktu Penelitian .....          | 51 |
| 3.5 Informan .....                             | 51 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data.....               | 52 |
| 3.6.1. Observasi.....                          | 52 |
| 3.6.2. Wawancara.....                          | 53 |
| 3.6.3. Dokumentasi .....                       | 53 |
| 3.7 Teknik Analisis Data.....                  | 53 |
| 3.7.1. Reduksi Data.....                       | 53 |
| 3.7.2. Data Display .....                      | 54 |
| 3.7.3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) ..... | 54 |

### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....                                           | 55 |
| 4.2 Geografi Kota Bandar Lampung .....                                                 | 56 |
| 4.3 Keadaan Iklim dan Topografi Kota Bandar Lampung.....                               | 57 |
| 4.4 Kependudukan Kota Bandar Lampung .....                                             | 57 |
| 4.5 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.....                           | 61 |
| 4.5.1 Profil Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota<br>Bandar Lampung.....               | 61 |
| 4.5.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota<br>Bandar Lampung .....       | 63 |
| 4.5.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota<br>Bandar Lampung ..... | 63 |

### **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1 Ketidakefektifan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar<br>(PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung ..... | 65  |
| 5.1.1. Komunikasi.....                                                                                                                          | 77  |
| 5.1.2. Sumber Daya.....                                                                                                                         | 86  |
| 5.1.3. Disposisi .....                                                                                                                          | 93  |
| 5.1.4. Birokrasi .....                                                                                                                          | 93  |
| 5.2 Faktor Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui<br>Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung.....                            | 98  |
| 5.2.1. Faktor Pendukung .....                                                                                                                   | 100 |
| 5.2.2. Faktor Penghambat .....                                                                                                                  | 100 |
| 5.2.3. Kebijakan.....                                                                                                                           | 101 |
| 5.2.4. Karakteristik Agen Pelaksana .....                                                                                                       | 102 |
| 5.2.5. Komunikasi.....                                                                                                                          | 103 |
| 5.2.6. Kondisi Sosial Ekonomi.....                                                                                                              | 104 |
| 5.2.7. Disposisi Pelaksana.....                                                                                                                 | 105 |

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 6.1 Kesimpulan..... | 111 |
| 6.2 Saran.....      | 112 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>                                                                                                         | <b>Halaman</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 1. Data Anak Putus Sekolah (APS) di Provinsi Lampung .....                                                     | 7              |
| Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan .....                                                        | 8              |
| Tabel 3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Bandar Lampung .....                                           | 9              |
| Tabel 4. Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung ....                                    | 10             |
| Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin<br>Tahun 2023 .....                           | 58             |
| Tabel 6. Jumlah Lingkungan dan RT Berdasarkan Kecamatan Kota Bandar<br>Lampung Tahun 2023 .....                      | 58             |
| Tabel 7. Tingkat Kegiatan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2023.....                                             | 59             |
| Tabel 8. Wisata Budaya Kota Bandar Lampung.....                                                                      | 60             |
| Tabel 9. Tingkat Pendidikan Aparatur Pelaksana Pendistribusian Dana Bantuan<br>KIP di SMPN Kota Bandar Lampung ..... | 89             |
| Tabel 10. Pembahasan Teori Edwar III Untuk Menjawab Rumsan Masalah.....                                              | 106            |



## DAFTAR GAMBAR

| <b>Gambar</b>                                                                           | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 1. Empat Faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi<br>Kebijakan Publik ..... | 20             |
| Gambar 2. Kerangka Fikir .....                                                          | 44             |
| Gambar 3. Struktur Organisasi.....                                                      | 64             |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan aspek penting yang dianggap sangat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang maksimal sehingga hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Tentunya harapan manusia di masa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan lebih baik dari keadaan sekarang. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik (Said, 2012:28). Hal ini dikarenakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan mempunyai fungsi yang sangat vital dalam proses pengembangan masyarakat. Hal ini tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwasanya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Masalah Pendidikan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, pada penyelenggaraan pendidikan bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah

memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Sehingga dalam hal ini, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia (Rohman, 2009 : 41).

Demi mewujudkan amanat dan hak masyarakat tersebut pemerintahan membuat suatu kebijakan namun suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat bila tidak di implementasikan. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan tenaga ahli dari dalam negeri, maupun dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak

mampu dilaksanakan dengan baik (Saroni, 2013 : 12).

Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan akses dan mutu pendidikan kepada seluruh warga masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang kehidupan serta untuk memajukan bangsa dan negara agar tercapai masyarakat yang terdidik, cerdas dan berakhlak mulia. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar melalui kartu Indonesia pintar.

Kartu Indonesia Pintar (disingkat juga KIP) merupakan bentuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (disingkat PIP) yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo. Kartu ini diresmikan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera pada 3 November 2014. Kartu Indonesia Pintar diperuntukkan bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) untuk memberikan manfaat pendidikan secara optimal. Semula kebijakan ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Penerima manfaat KIP meningkat dari target 15 juta siswa menjadi 19 juta siswa, dengan penyaluran dana yang telah mencapai 100% pada akhir tahun 2015.

Distribusi KIP telah dilakukan secara bertahap ke seluruh Indonesia mulai tahun 2015. Pada 21 Desember 2015, sebanyak 19 juta KIP telah didistribusikan. Pada tahun 2016, target penerima manfaat KIP terus diperluas dengan menyasar anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum bersekolah. Supaya menyasar target yang tepat, KIP 2016 menggunakan data terbaru dari Basis Data Terpadu (BDT) yang diterima bertahap dari TNP2K mulai 10 Februari hingga 1 Maret 2016. Setelah melalui proses filter dan sinkronisasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemdikbud, akhirnya Kartu Indonesia Pintar bisa tercetak lebih banyak. Pada tahun 2016, ditargetkan sebanyak 17.927.758 penerima manfaat PIP. Dengan kapasitas cetak 500 ribu per hari, per 20 April 2016, KIP sudah tercetak

sebanyak 9.987.366 dan sudah dikirimkan ke daerah sebanyak 148.878 kartu. Pada tahun 2022 yang terdiri dari 20 kecamatan di kota Bandar Lampung sebanyak 43.869 siswa siswi yang menerima bantuan tersebut. Sementara itu, Penerapan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung sudah mulai diterapkan semenjak Tahun 2018.

Program Indonesia Pintar sebagai pengganti dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu tersebut sebagai identitas/penanda untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar dan hal ini hanya akan diperoleh apabila anak tersebut mendaftar di sekolah/madrasah, pondok pesantren. Mengenai regulasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Bandar Lampung, secara eksplisit tidak diatur di dalam peraturan yang lebih khusus mengenai pelaksanaan PIP. Melainkan langsung merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) menjelaskan bahwa sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar juga menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Penerima KIP adalah anak usia 6-21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya anak-anak usia sekolah dari rumah



tangga miskin dan rentan kemiskinan melaporkan KIP tersebut ke sekolah/madrasah untuk diusulkan sebagai penerima manfaat program tersebut. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Salah satu faktor yang menghasilkan PIP adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Sen & Fitoussi (2011:68) menyebutkan bahwa kualitas hidup adalah konsep yang lebih luas daripada produksi ekonomi dan standar hidup. Kualitas hidup mencakup sekumpulan penuh faktor-faktor yang mempengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup antara lain diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian. Kualitas kehidupan (*quality of life*) merujuk pada kesejahteraan suatu masyarakat secara umum dalam hal kebebasan berpolitik, lingkungan hidup alami yang bersih, hingga pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat berdampak pada kualitas atau kesejahteraan hidupnya. Penduduk yang berpendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan profesi dengan penghasilan lebih layak, lebih memahami arti kesehatan dan lebih matang dalam kesehatan mental psikologi. Dengan demikian pendidikan merupakan aset hidup manusia dan penting untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Terdapat komponen standar hidup layak diukur menggunakan indikator konsumsi riil yang disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjust real percapita*) sebagai

ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara atau wilayah. Perhitungan ketiga komponen di atas menunjukkan bahwa setiap komponen merupakan hasil perhitungan tersendiri dan bukan merupakan hasil perhitungan dari indikator-indikator lain. Sehingga tidak dapat dibentuk suatu model yang terdiri dari indikator-indikator pembentukan setiap komponen. Karena itu, pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi dengan kajian dan analisis situasi terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi perkembangan IPM. (Nugraha, Yudha, & Galih, 2015 : 136)

Sehingga kualitas dan standar hidup manusia sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan di berbagai sektor yang merata merupakan kunci peningkatan kualitas hidup. Tanpa adanya pembangunan diberbagai sektor kualitas hidup tidak akan berjalan sesuai dengan mestinya. Tampaknya tidak ada sektor yang tidak berperan, sektor-sektor tersebut akan memberikan dampak terbaik dalam hal pembangunan. Disanalah akan muncul hasil yang memperkuat indikator kualitas hidup.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat dengan Disdikbud Provinsi Lampung Data Peserta Didik yang selanjutnya disingkat dengan Dapodik, pada bulan Agustus 2021 ini sampai dengan saat ini APS mencapai 4.063 orang, khususnya di Kota Bandar Lampung tercatat ada 352 anak putus sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2022). Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1. Data Anak Putus Sekolah (APS) di Provinsi Lampung**

| <b>Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------------------|---------------|
| (1)                   | (2)           |
| Lampung Barat         | 227           |
| Lampung Selatan       | 498           |
| Lampung Tengah        | 456           |
| Lampung Timur         | 436           |
| Lampung Utara         | 170           |
| Mesuji                | 283           |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Pesawaran           | 262          |
| Pesisir Barat       | 256          |
| Pringsewu           | 115          |
| Tanggamus           | 329          |
| Tulang Bawang       | 233          |
| Tulang Bawang Barat | 112          |
| Way Kanan           | 295          |
| Metro               | 39           |
| Bandar Lampung      | 352          |
| <b>Tota<br/>l</b>   | <b>4.063</b> |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2023 (Data dalam Profil APS Provinsi Lampung)

Beberapa kasus yang terjadi kebanyakan terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Alasan ketidakmampuan ekonomi juga menjadi salah satu penghambat mereka untuk bersekolah, sehingga prestasi dan kemampuan mereka tidak dapat berkembang dengan baik (Sri Kaidah:2022). Namun banyak faktor lain yang menjadi penjelas putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau. Hal ini dibutuhkan upaya pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah ini dalam rangka mencapai pemerataan pendidikan khususnya di Kota Bandar Lampung.

Pada *locus* penelitian ini, di tahun 2023 Kota Bandar Lampung memiliki 1.184.949 penduduk, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Berita Resmi Statistik Nomor 07/01/18/Th.XVI, 17 Januari 2022 Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung tahun 2022 persentase penduduk miskin di daerah perkotaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan**

| <b>Tahu<br/>n</b> | <b>Persenta<br/>se</b> |
|-------------------|------------------------|
| (1)               | (2)                    |
| 2020              | 8%                     |
| 2021              | 8, 50%                 |
| 2022              | 11%                    |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 2 tentunya tidak sebanding dengan total jumlah penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung dengan jumlah kuota penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Upaya pemerataan penerapan program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung belum diimplementasikan secara merata pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut ini :

**Tabel 3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Bandar Lampung**

| <b>Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan</b> | <b>Angkatan Kerja</b> |                             |                |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
|                                             | <b>Bekerja</b>        | <b>Pengangguran Terbuka</b> | <b>Jumlah</b>  |
| (1)                                         | (2)                   | (3)                         | (4)            |
| Sekolah Dasar                               | 68.227                | 5.872                       | 74.099         |
| Sekolah Menengah Pertama                    | 63.817                | 8.874                       | 72.691         |
| Sekolah Menengah Atas                       | 181.729               | 14.162                      | 195.891        |
| Perguruan Tinggi                            | 107.778               | 7.085                       | 114.863        |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>468.121</b>        | <b>36.728</b>               | <b>504.849</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Sehingga, berdasarkan pemaparan data pada tabel 3, jumlah masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah menyelesaikan pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi sebesar 504.849 dari 1.184.949 penduduk. Dapat dikatakan setengah dari total jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Perguruan Tinggi.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program KIP. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung turut mendukung pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Telah mendistribusikan KIP kepada pelajar dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Hal tersebut tertuang di dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 4. Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung**

| No | Tahun             | Total Kuota |               | Total Kuota Diberikan |               |
|----|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|
|    |                   | Siswa       | Rp            | Siswa                 | Rp            |
| 1  | Kec. Bumi Waras   |             |               |                       |               |
|    | 2018              | 2.149       | 903.425.000   | 1.900                 | 803.450.000   |
|    | 2019              | 1.836       | 784.675.000   | 1.745                 | 745.500.000   |
|    | 2020              | 3.096       | 1.266.100.00  | 2.579                 | 1.034.925.000 |
|    | 2021              | 2.409       | 979.450.000   | 1.844                 | 811.575.000   |
|    | 2022              | 1.980       | 821.725.000   | 1.568                 | 690.400.000   |
| 2  | Kec. Enggal       |             |               |                       |               |
|    | 2018              | 4.319       | 973.725.000   | 4.025                 | 931.000.000   |
|    | 2019              | 3.993       | 2.448.050.000 | 3.797                 | 2.342.225.000 |
|    | 2020              | 3.846       | 2.522.150.000 | 3.446                 | 2.286.575.000 |
|    | 2021              | 3.968       | 2.426.575.000 | 2.394                 | 1.569.075.000 |
|    | 2022              | 3.234       | 2.081.500.000 | 2.438                 | 1.436.475.000 |
| 3  | Kec. Kedamaian    |             |               |                       |               |
|    | 2018              | 1.961       | 973.725.000   | 1.866                 | 931.000.000   |
|    | 2019              | 1.545       | 777.175.000   | 1.467                 | 725.725.000   |
|    | 2020              | 1.703       | 891.300.000   | 1.453                 | 726.725.000   |
|    | 2021              | 1.850       | 958.875.000   | 1.036                 | 524.750.000   |
|    | 2022              | 1.139       | 612.675.000   | 968                   | 494.225.000   |
| 4  | Kec. Kedaton      |             |               |                       |               |
|    | 2018              | 1.583       | 797.375.000   | 1.440                 | 733.175.000   |
|    | 2019              | 1.394       | 731.100.000   | 1.261                 | 654.700.000   |
|    | 2020              | 1.781       | 876.900.000   | 1.540                 | 733.550.000   |
|    | 2021              | 1.587       | 797.250.000   | 1.056                 | 453.050.000   |
|    | 2022              | 1.187       | 654.875.000   | 929                   | 466.000.000   |
| 5  | Kec. Kemiling     |             |               |                       |               |
|    | 2018              | 5.412       | 2.099.925.000 | 4.978                 | 2.807.832.000 |
|    | 2019              | 4.826       | 2.685.450.000 | 4.495                 | 2.512.125.000 |
|    | 2020              | 5.135       | 2.915.075.000 | 4.345                 | 2.454.175.000 |
|    | 2021              | 5.287       | 2.988.325.000 | 2.963                 | 1.640.600.000 |
|    | 2022              | 4.137       | 2.364.550.000 | 3.224                 | 1.852.125.000 |
| 6  | Kec. Labuhan Ratu |             |               |                       |               |
|    | 2018              | 1.971       | 1.058.875.000 | 1.763                 | 976.075.000   |
|    | 2019              | 1.828       | 998.425.000   | 1.670                 | 915.300.000   |
|    | 2020              | 2.492       | 1.394.850.000 | 1.946                 | 1.036.850.000 |

|    |                           |       |               |       |               |
|----|---------------------------|-------|---------------|-------|---------------|
|    | 2021                      | 1.579 | 854.025.000   | 1.089 | 566.175.000   |
|    | 2022                      | 1.431 | 764.800.000   | 1.203 | 633.475.000   |
| 7  | Kec. Langkapura           |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 1.931 | 864.350.000   | 1.491 | 680.375.000   |
|    | 2019                      | 1.655 | 756.675.000   | 1.402 | 638.625.000   |
|    | 2020                      | 2.134 | 973.275.000   | 1.563 | 723.500.000   |
|    | 2021                      | 1.667 | 781.125.000   | 1.108 | 515.050.000   |
|    | 2022                      | 1.532 | 705.025.000   | 1.121 | 525.150.000   |
| 8  | Kec. Panjang              |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 4.901 | 2.523.625.000 | 4.255 | 2.275.600.000 |
|    | 2019                      | 4.131 | 2.174.750.000 | 3.754 | 1.195.475.000 |
|    | 2020                      | 5.472 | 2.830.475.000 | 4.873 | 2.512.725.000 |
|    | 2021                      | 5.247 | 2.660.150.000 | 3.245 | 1.655.750.000 |
|    | 2022                      | 4.963 | 2.550.275.000 | 3.529 | 1.784.450.000 |
| 9  | Kec. Rajabasa             |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 3.333 | 1.910.775.000 | 3.067 | 1.797.350.000 |
|    | 2019                      | 2.982 | 1.721.075.000 | 2.757 | 1.601.725.000 |
|    | 2020                      | 3.269 | 2.071.875.000 | 2.797 | 1.767.725.000 |
|    | 2021                      | 3.148 | 1.794.125.000 | 1.832 | 1.078.975.000 |
|    | 2022                      | 2.337 | 1.372.075.000 | 1.837 | 1.017.550.000 |
| 10 | Kec. Sukabumi             |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 4.304 | 2.429.725.000 | 4.009 | 2.299.050.000 |
|    | 2019                      | 3.346 | 1.823.025.000 | 3.219 | 1.756.650.000 |
|    | 2020                      | 3.359 | 1.841.875.000 | 2.913 | 1.588.750.000 |
|    | 2021                      | 3.447 | 1.765.650.000 | 1.807 | 954.325.000   |
|    | 2022                      | 2.407 | 1.305.400.000 | 1.988 | 1.007.825.000 |
| 11 | Kec. Sukarame             |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 3.901 | 2.324.050.000 | 3.596 | 2.168.600.000 |
|    | 2019                      | 3.583 | 2.123.200.000 | 3.401 | 2.013.300.000 |
|    | 2020                      | 4.145 | 2.593.100.000 | 3.312 | 2.037.900.000 |
|    | 2021                      | 3.534 | 2.266.200.000 | 2.110 | 1.290.100.000 |
|    | 2022                      | 2.961 | 1.305.400.00  | 2.169 | 1.278.550.000 |
| 12 | Kec. Tanjung Karang Barat |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 4.269 | 2.163.675.000 | 3.742 | 1.949.900.000 |
|    | 2019                      | 3.906 | 2.100.975.000 | 3.636 | 1.967.700.000 |
|    | 2020                      | 4.438 | 2.616.300.000 | 4.128 | 2.430.800.000 |
|    | 2021                      | 5.590 | 3.090.100.000 | 3.002 | 1.680.250.000 |
|    | 2022                      | 3.634 | 2.001.675.000 | 3.170 | 1.686.200.000 |
| 13 | Kec. Tanjung Karang Pusat |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 4.179 | 2.434.800.000 | 3.667 | 2.221.875.000 |
|    | 2019                      | 3.853 | 2.364.275.000 | 3.557 | 2.209.075.000 |
|    | 2020                      | 4.127 | 2.427.225.000 | 3.546 | 2.106.125.000 |
|    | 2021                      | 3.935 | 2.287.550.000 | 2.286 | 1.308.000.000 |
|    | 2022                      | 3.114 | 1.858.075.000 | 2.434 | 1.344.300.000 |
| 14 | Kec. Tanjung Karang Timur |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 1.590 | 722.975.000   | 1.484 | 683.425.000   |



|    |                           |       |               |       |               |
|----|---------------------------|-------|---------------|-------|---------------|
|    | 2019                      | 2.864 | 1.349.550.000 | 2.692 | 1.268.280.000 |
|    | 2020                      | 1.552 | 689.850.000   | 1.382 | 616.950.000   |
|    | 2021                      | 1.755 | 772.175.000   | 914   | 394.175.000   |
|    | 2022                      | 1.114 | 502.150.000   | 966   | 396.875.000   |
| 15 | Kec. Tanjung Senang       |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 2.952 | 1.657.500.000 | 2.694 | 1.555.150.000 |
|    | 2019                      | 2.601 | 1.513.150.000 | 2.369 | 1.385.750.000 |
|    | 2020                      | 3.255 | 1.912.000.000 | 2.472 | 1.438.225.000 |
|    | 2021                      | 2.748 | 1.665.625.000 | 1.510 | 864.575.000   |
|    | 2022                      | 1.743 | 1.076.050.000 | 1.560 | 942.150.000   |
| 16 | Kec. Teluk Betung Barat   |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 2.817 | 1.362.175.000 | 2.716 | 1.320.425.000 |
|    | 2019                      | 2.368 | 1.181.825.000 | 2.267 | 1.124.575.000 |
|    | 2020                      | 2.254 | 1.067.625.000 | 2.035 | 1.022.150.000 |
|    | 2021                      | 2.089 | 1.079.575.000 | 1.524 | 770.150.000   |
|    | 2022                      | 2.020 | 973.650.000   | 1.693 | 829.375.000   |
| 17 | Kec. Teluk Betung Selatan |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 5.777 | 2.979.325.000 | 5.589 | 2.896.900.000 |
|    | 2019                      | 4.901 | 2.497.700.000 | 4.769 | 2.431.425.000 |
|    | 2020                      | 5.591 | 2.908.150.000 | 5.209 | 2.663.825.000 |
|    | 2021                      | 5.173 | 2.623.400.000 | 3.804 | 1.955.300.000 |
|    | 2022                      | 4.058 | 2.065.275.000 | 3.388 | 1.700.975.000 |
| 18 | Kec. Teluk Betung Timur   |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 4.458 | 2.340.825.000 | 4.279 | 2.261.375.000 |
|    | 2019                      | 4.038 | 2.165.100.000 | 3.854 | 2.071.125.000 |
|    | 2020                      | 4.599 | 2.350.100.000 | 4.069 | 2.110.725.000 |
|    | 2021                      | 4.664 | 2.454.600.000 | 2.816 | 1.472.300.000 |
|    | 2022                      | 4.522 | 2.276.175.000 | 3.418 | 1.786.375.000 |
| 19 | Kec. Teluk Betung Utara   |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 6.210 | 3.699.125.000 | 5.958 | 3.568.100.000 |
|    | 2019                      | 5.647 | 3.477.775.000 | 5.458 | 3.352.075.000 |
|    | 2020                      | 5.887 | 3.535.000.000 | 5.574 | 3.337.130.000 |
|    | 2021                      | 5.806 | 3.519.125.000 | 4.003 | 2.346.000.000 |
|    | 2022                      | 4.793 | 3.011.825.000 | 3.977 | 2.402.750.000 |
| 20 | Kec. Way Halim            |       |               |       |               |
|    | 2018                      | 1.538 | 630.525.000   | 1.162 | 70.830.000    |
|    | 2019                      | 1.823 | 927.175.000   | 1.673 | 861.025.000   |
|    | 2020                      | 2.264 | 1.172.250.000 | 1.810 | 973.600.000   |
|    | 2021                      | 1.926 | 1.015.800.000 | 1.379 | 760.900.000   |
|    | 2022                      | 1.793 | 989.625.000   | 1.375 | 717.875.000   |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Berdasarkan dari tabel 4, semenjak Tahun 2018 Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membantu mensejahterakan masyarakat melalui program pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2017 penduduk miskin Indonesia berjumlah 28.513.57 ribu jiwa dan tahun 2018 berjumlah 28.005.41 sedangkan di provinsi Lampung jumlah penduduk miskin 2017 berjumlah 1.100.68 ribu jiwa naik menjadi 1.169.60 ribu jiwa. Namun bagaimanapun juga, pendidikan tetap harus dinomor satukan, sebab jika tak ada ilmu tidak akan dapat memperbaiki kemiskinan.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2016, kementerian pendidikan menargetkan 17,9 juta anak Indonesia untuk mendapatkan KIP dan menerima manfaat bantuan pendidikan PIP. Target untuk peserta didik pada jenjang SD/Paket A sebanyak 10.360.614 orang, untuk SMP/Paket B sebanyak 4.369.968 orang, sementara untuk SMA/Paket C sebanyak 1.367.559 orang, dan untuk SMK/Khusus dan Pelatihan sebanyak 1.829.167 orang. Pasal-pasal berkaitan dengan pendidikan didalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). pada pasal 31 ayat (1) berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat (2) berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP yang sedang dilaksanakan.

Wajib belajar ini dilaksanakan maka biaya harus ditanggung oleh negara, kewajiban negara ini berkaitan dengan ayat 4 dengan pasal yang sama yang mengharuskan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Program Indonesia Pintar serta masih adanya siswa yang berasal dari tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah peruntukan bagi siswa yang berasal

dari keluarga yang tidak mampu agar mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi dari dana Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian sekolah, perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, biaya kursus dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan sekolah.

Permasalahan dalam program Indonesia pintar yaitu program Indonesia pintar ini belum berjalan dengan maksimal sebagaimana semestinya hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran wali murid tentang peruntukan bantuan PIP, dalam pemberian bantuan ini tidak tepat sasaran, adanya penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar oleh penerima program ini, pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar belum maksimal digunakan oleh penerima manfaat. Masalah terjadi pemerintah sulit untuk mengawasi karena penyaluran dana tersebut langsung ke orang tua siswa dan orang tua yang mengelola, sekolah tidak dapat mengetahui dana tersebut buat apa saja, pada saat orang tua tidak bisa mengelola dana tersebut dengan baik maka banyak penyalahgunaan dana tersebut untuk pribadi bukan untuk kebutuhan pendidikan anak, adanya kecemburuan bagi yang tidak menerima bantuan yang merasa berhak menerima dengan yang mendapatkan bantuan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, pendistribusian ataupun penyaluran bantuan pendidikan pada kebijakan KIP seyogyanya harus diimplementasikan secara merata dan komprehensif. Mengingat kebutuhan akan pendidikan dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Disamping itu pula, kuota penerima KIP sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, penulis menemukan terjadinya ketidaksesuaian antara kuota penerima yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di Kota Bandar Lampung sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa koordinator dan kepala sekolah di sekolah menengah pertama di Bandar Lampung menyatakan bahwa sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana

yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada saat penerimaan dana KIP orang tua siswa tidak dapat mengelolanya dengan baik sehingga, dana KIP menjadi tidak tepat sasaran karena digunakan untuk keperluan pribadi bukan sebagai keperluan pendidikan.

Salah satu sekolah di kota Bandar Lampung yang memiliki siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar SMPN 36 Bandar Lampung serta SMP Negeri yang lain, siswa yang menerima program Indonesia pintar masing-masing siswa di sekolah ini menerima bantuan setiap tahun. Dana tersebut di gunakan untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantar lain untuk membeli tas, buku dan keperluan lainnya. siswa tersebut mendapat bantuan program Indonesia pintar atau kartu Indonesia pintar berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan program keluarga harapan yang dikirim dari pemerintah pusat. Adanya kebijakan kartu Indonesia pintar yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional.

Pendistribusian KIP di Kota Bandar Lampung pada tahun pelajaran 2022/2023 terdapat siswa miskin dari sekolah ini yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Masing-masing siswa di sekolah ini menerima bantuan sebesar Rp. 750.000,00 Per-tahun. Dana tersebut digunakan oleh siswa untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantaranya untuk membeli alat tulis, tas, sepatu, dan lain- lain. Siswa tersebut mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikirim dari Pemerintah pusat. Adanya kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional.

Sementara itu pada penelitian lain yang dilakukan oleh Pulungan (2018 : 95), implementasi Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan pihak sekolah di SMP Negeri 1 Tanjung Pura Kabupaten Langkat belum berjalan sesuai dengan petunjuk yang diberikan hanya saja yang di berikan pihak penyalur masih kurang dalam hal berpartisipasi dan penyaluran dana dan penggunaan dana bantuannya yang masih

berpotensi disalahgunakan. Ditambah lagi masih banyak siswa yang tidak mendapat Kartu Indonesia Pintar, kurangnya partisipasi bank dalam penyaluran dana membuat pelaksanaan program tidak berjalan tepat waktu, serta lambatnya bank penyalur menyebabkan penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) terbengkalai. Selain itu strategi pencapaian program Kartu Indonesia Pintar sudah berjalan dengan baik sehingga siswa dapat mengembangkan potensi diri mereka dalam belajar untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hasanah (2020 : 80), dalam menjalankan program indonesia pintar ini memang belum tepat sasaran karena tidak sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam PERMENSOS No 12 Tahun 2015 Tentang Kartu Indonesia Pintar, seperti orang yang menerima kartu indonesia pintar tersebut masih yang berasal dari orang yang mampu, kemudian kartu indonesia pintar tersebut tidak tepat guna. ketiga upaya yang dilakukan aparat desa berembang adalah ingin bekerja sama dengan pemerintah yang terkait dalam menentukan data penerima KIP tersebut, agar pelaksanaan kartu indonesia pintar kedepannya lebih efisien dan lebih tepat sasaran, dengan harapan kendala yang terjadi saat ini dapat terselesaikan kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut, menunjukan bahwasanya masih banyak hambatan dan tantangan dalam penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti jabarkan di atas, yakni terkait implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya meningkatkan kualitas hidup di Kota Bandar Lampung Peneliti mempertegas permasalahan penelitian dengan bentuk rumusan penelitian sebagai berlaku :

1. Mengapa terjadi ketidakefektifan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung ?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, dalam hal ini peneliti mendalilkan tujuan penelitian di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai ketidakefektifan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung
2. Mendeskripsikan faktor penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis, yang terdiri dari :

- a. Dalam penelitian ini peneliti berharap bisa membagikan sumbangsih buah pikir yang bersifat ilmiah serta memberikan data ilmiah yang berciri khas akademis dalam mengoptimalkan pemikiran ilmiah pada bidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Memberdayakan ilmu dan pengetahuan guna mendukung pengembangan khazanah intelektual dibidang Ilmu Pemerintahan.
- c. Memperkaya pengetahuan dalam mendukung pengembangan ilmu untuk segala mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta pada bidang Ilmu Pemerintahan.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Secara praktik penelitian ini merupakan gagasan untuk Peneliti yang sekiranya bermanfaat dalam mengoptimalkan ilmu dan pengetahuan disegikebijakan :

- a. Dapat menambah wawasan mengenai Kebijakan Kartu Indonesia Pintar serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi

peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.

- b Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dalam mengambil keputusan terkait dengan KebijakanKartu Indonesia Pintar
- c Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada kalangan yangmembutuhkan.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Implementasi Kebijakan

#### 2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Dunn (1994:29) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan ialah tahapan strategis yang dilakukan setelah adanya proses perumusan suatu kebijakan, dikarenakan pada tahap ini suatu kebijakan akan diuji, baik secara substantif maupun tingkat efektivitas penggunaannya. Disisi lain, Grindle (1980:7) menyatakan, Implementasi Kebijakan merupakan proses umum tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Lebih lanjut, Grindle (1980:7) menjelaskan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sedangkan Van Wibawa dkk,(1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Intan (2017:116) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. *“Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions”*. Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam undang-undang tetapi juga dapat berbentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan.

Lebih lanjut, menurut Jones (1987:31) (dalam Intan Fitri Meutia, (2017:80) implementasi merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Menurut Udoji (1981:14) Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.

Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan. Lebih lanjut, menurutnya implementasi sangat penting karena penerapan di masyarakat sangat berpengaruh adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Untuk melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level bureaucracy* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. Implementasi Kebijakan sangat penting karena :

1. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya.
2. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit.
3. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi.
4. Selama implementasi sering terjadi beragam interpretasi atas tujuan, target maupun strateginya.
5. Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional.
6. Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi.
7. Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan.
8. Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan.

Di lain pihak, Grindle mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Pendekatan Kebijakan Publik Grindle dikenal dengan “*implementation as a political and administrative process*”.

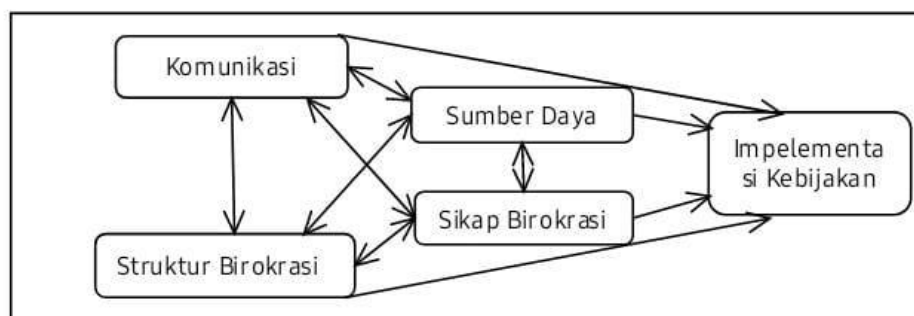
### 2.1.2 Perspektif Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik memiliki berbagai pendekatan, salah satunya yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1984:9-10). Edwards III mengemukakan *implementation problem approach* dengan mengajukan dua pertanyaan pokok yakni :

1. Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
2. Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan

Berdasarkan kedua hal tersebut Edwards III merumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni ;

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap Birokrasi
4. Struktur Birokrasi



**Gambar 1. Empat Faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Publik**  
(Sumber : Data diolah (Edward III 1980 : 148))

Menurut George C. Edwards III definisi dari empat faktor diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi, merupakan parameter seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu regulasi telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana aturan tersebut. Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampiran, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang

berhak menerimanya (Anwar Arifin, 2000:5). Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas.

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*), disposisi.

#### a. Penyaluran Komunikasi (Transmisi)

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun seringkali keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangannya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan.

Hal ini mungkin dapat terjadi disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam penyaluran komunikasi terhadap suatu keputusan atau hambatan yang dibuat. Menurut (Winarno 2002:17) hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah

yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan ini menimbulkan distorsi terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan kekuasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melakukan suatu keputusan.

- 2) Adanya hierarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat sehingga kondisi ini akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana.
- 3) Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

#### b. Kejelasan Komunikasi

Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak menyenangi atau tidak menyetujui terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau dikhawatirkan akan merugikan dan mengecewakan salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam berkomunikasi, mungkin juga disebabkan karena mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

#### c. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari

aparatur pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

## 2. Sumber Daya,

Sumber daya merupakan wujud dari kekuatan maupun alat yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menjalankan implementasi kebijakan. Sumber daya dapat berwujud kecukupan dan kualifikasi sumber daya manusia, kewenangan, informasi dan sarana prasarana dari pelaksana implementasi kebijakan.

### a. Kecukupan dan Kualifikasi

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampaian yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterlampaian yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterlampaian juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

### b. Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang

ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

#### c. Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### 3. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, merupakan kecenderungan suatu birokrasi untuk memilih suatu bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam memecahkan suatu permasalahan sosial yang dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ada dua karakteristik dalam birokrasi yakni, prosedur kerja baku standar, atau standar operating procedure (SOP) dan fragmentasi.

Sikap Birokrasi, merupakan respon/kecenderungan/disposisi dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Menurut (Winarno, 2004:142) jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit.

Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepakat dalam melihat substansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

#### 4. Disposisi

Pelaksanaan kebijakan ini masih terjadi kesalahan sasaran penerima bantuan, pada beberapa permasalahan yang ditemui ada keluarga yang sebenarnya dari segi ekonomi mampu tapi menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebaliknya ada keluarga yang ekonominya dapat dikatakan kurang mampu tapi tidak merasakan kebermanfaatan dari program kebijakan ini. Selain itu kendala yang dialami oleh pelaksana kebijakan PIP terletak pada proses pengajuan ataupun pencairan, hal ini dilatarbelakangi oleh responsifitas pelaksana tingkat sekolah dalam mengumpulkan data. Karena sebagian sekolah bertindak cepat dalam pengumpulan persyaratan, namun sebagian sekolah selalu terlambat dalam pengumpulan berkas persyaratan. Selain itu masalah juga terletak pada komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak Bank. Perbedaan kebijakan terkait persyaratan dalam pencairan biasanya terjadi pada antar bank, selain itu pihak bank juga melakukan kelalaian terhadap berkas pencairan, karena itu menyebabkan pencairan dana jadi tertunda. Berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa sikap (Disposisi) pelaksana menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan PIP, tidak sedikit kendala yang timbul dari pelaksana seperti keterlambatan pengumpulan berkas dari sekolah ataupun keterlambatan pencairan karena masalah di pelaksana pendukung yaitu BRI. Selain itu adanya ketidak tepatan sasaran penerima PIP juga menjadi penghambat keberhasilan kebijakan.



*Standard Operating Procedure* (SOP) berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut. Dari keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan.

Karakteristik yang kedua dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan kompleks membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah- pecah padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil.

Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Triana (2011: 61-63), menurutnya secara umum faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan (*Unimplemented Policy & Poorly Implemented Policy*) disebabkan oleh :

1. *Unimplemented Policy* :

- a Kebijakan hanya bersifat politis dan tidak benar-benar dimaksudkan untuk dilaksanakan. Kebijakan seperti ini umumnya hanya untuk mengakomodir tuntutan-tuntutan kelompok kepentingan yang bersifat oposisi.
- b Kesulitan menafsirkan kebijakan dalam bentuk-bentuk kegiatan operasional, baik tujuan kebijakan yang terlalu utopis, tidak sesuai dengan keadaan lapangan, ataupun karena kendala-kendala di lapangan yang membatasi alternatif tindakan.

2. *Poorly Implemented Policy*

Lemahnya kapasitas implementasi (*implementation capacity*) dari pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena :

- a. Struktur implementasi tidak disusun secara efektif.
- b. Benturan penafsiran atas tujuan program antar aktor, baik administrator, petugas lapangan, maupun kelompok sasaran.
- c. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun kelompok sasaran.
- d. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas pelaksana (SDM yang dibutuhkan tidak tepat/sesuai)
- e. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas organisasional dari institusi-institusi pelaksana
- f. Lemahnya manajemen implementasi
- g. Kurangnya resources (anggaran, alat, waktu) dan lain-lain.

Berdasarkan dari kedua teori yang di ungkapkan oleh Edwards dan Triana di atas, peneliti memiliki alasan mengapa menggunakan kedua teori tersebut di dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan, pada teori tersebut memiliki koherensi dan relevansi yang tepat dalam membedah dan menganalisis permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Sehingga,

dapat mencapai urgensi dan orientasi yang relevan dengan tujuan yang ada di dalam penelitian ini.

### 2.1.3 Studi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Intan Fitri Meutia (2017:70) studi implementasi, mau tak mau, akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa. Disisi lain seberapa banyak kegagalan implementasi kebijakan publik dibagi ke dalam dua kategori besar yaitu :

1. *Non - implementation* (tidak terimplementasikan); dan
2. *Unsuccssesful implementation* (implementasi yang tidak berhasil).

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah mati, atau karena mereka bekerja tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang di garap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

Sementara itu implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan-semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan (*coup de' tat*), bencana alam, dan lain sebagainya hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya, kebijakan yang memiliki risiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor berikut: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*), kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

## **2.2 Kebijakan Pendidikan**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan menurut Kartasamita dalam (Widodo, 2008:64), merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah; apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi; dan apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa yang berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam (Rohman, 2014 : 42). Menurut A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008 : 31) Kebijakan merupakan suatu kata benda asli dari deliberasi mengenai tindakan (*behavior*) dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai ramburambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi tindakan tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian program pemerintah yang dilakukan atau tidak dilakukan untuk memecahkan masalah atau hambatan- hambatan untuk mencapai tujuan tertentu.

### **2.2.2 Pengertian Pendidikan**

Menurut Dwi Siswoyo (2011 : 68) pendidikan memainkan peranan yang penting didalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu yang dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya jiwanya (akal, rasa dan kehendak), sosialnya dan moralitasnya. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan.

Pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melekat kepada setiap kehidupan bersama, atau dalam bahasa politik disebut sebagai “Negara- bangsa”, dalam rangka menjadikan kehidupan bersama tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan kehidupan (Nugroho, 2008 : 90). Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo dalam (Ahmadi, 2014 : 12) adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu.

Tujuan pendidikan disesuaikan dengan dimensi-dimensi kehidupan manusia. Setiap dimensi kehidupan (pembangunan) memiliki tujuan masing-masing dan semua dimensi itu motor penggeraknya adalah manusia yang memilih, menentukan, dan melaksanakan pilihannya guna untuk mencapai tujuan hidup, baik tujuan kehidupan manusia secara umum maupun tujuan hidup secara spesifik (Ahmadi, 2014 : 22).

Tujuan pendidikan menurut A Tresna Sastrawijaya dalam (Idi, 2013 : 41) adalah mencakup kesiapan jabatan, ketrampilan memecahkan masalah, penggunaan waktu senggang dan sebagainya, karena setiap siswa mempunyai harapan yang berbeda. Sementara itu, tujuan pendidikan dengan bidang studi dapat dinyatakan lebih spesifik. Misalnya, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan tujuannya untuk membantu siswa berpartisipasi dalam masyarakat.

Dalam S. Nasution (2009 : 42) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap sekolah mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun, pendidikan di sekolah sering kurang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum kebanyakan berpusat pada bidang studi yang tersusun secara sistematis. Pelajaran tersebut hanya untuk memenuhi kepentingan sekolah dalam menghadapi ujian, bukan membantu anak hidup efektif dalam masyarakat.

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai yang diharapkan. Pendidikan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat melalui anak didik sebagai penerus masa depan. Salah satu peranan pendidikan dalam masyarakat adalah fungsi sosial yakni merupakan salah satu sarana pendidikan yang diharapkan masyarakat. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai terhadap tatanan tradisional masyarakat berfungsi sebagai pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk iman dan taqwa, meningkatkan kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan wawasan anak, sehingga dapat membawa kemajuan individu, masyarakat dan Negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Idi, 2013 : 52).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang menumbuhkan pengalaman-pengalaman sehingga anak-anak mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam perkembangan kehidupannya dan dapat mencapai kebahagiaan.

### **2.2.3 Proses Kebijakan Pendidikan**

Menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (2008 : 43) kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan (Rohman, 2014 : 35).

Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatkannya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara-bangsa di bidang pendidikan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan (Nugroho, 2008 : 97).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik dalam bidang pendidikan dalam perumusan visi dan misi pendidikan serta efisiensi biaya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Oleh karena itu, tahapan dari kebijakan pendidikan sama dengan tahapan pada kebijakan publik. Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh dalam AG Subarsono (2005 : 126) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut: Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah, formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah, pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan, Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil, evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

#### 2.2.4. Jenis-jenis Kebijakan

Kebijakan dirumuskan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Bernadus Luankali (2007) kebijakan adalah sebuah Ilmu tentang hubungan pemerintah dengan warga negara atau apa yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah secara riil untuk warga negara. Artinya, pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya saja, tetapi juga harus berdasarkan kepentingan masyarakat. Definisi lain dari kebijakan.

##### a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sesuatu yang apa pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. mendeskripsikan Definisi bahwa ini pemerintah berkewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang muncul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dirumuskan tersebut. Menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1988), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah atau isu isu publik dan pemerintahan. Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik sebagai bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat dan agar masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

##### b. Analisis Kebijakan Publik

Pandangan yang dikemukakan oleh Wildasky dalam Leslie A. Pal (1987: 9) mengatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan penyelesaian untuk masalah melakukan dalam suatu kebijakan publik. Berdasarkan pandangan tersebut, maka terdapat beberapa ciri analisis, salah satunya merupakan analisis kebijakan yang merupakan dasar dari pelaksanaan aktivitas kognitif. Artinya, analisis kebijakan merupakan landasan dari aspek-aspek kebijakan yang dapat mendefinisikan, menetapkan, memecahkan, dan meninjau kembali masalah kebijakan yang ada.



### 2.3 Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pengertian Implementasi dalam *Webster's Dictionary* (Rohman, 2009 : 68), menyatakan bahwa “implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibatterhadap sesuatu)”. Dari pengertian diatas bahwa suatu implementasi kebijakan merupakan suatu metode/cara dengan menggunakan alat dan sarana untuk menghasilkan suatu dampak /hasil dari keputusan kebijakan. Biasanya wujud dari keputusan kebijakan ini berupa ketetapan yang dibuat oleh pemerintah.

Mazmanian & Sabatier (2006 : 224) menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstukturkan/mengatur proses implementasinya.

Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2002 : 79) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Selanjutnya (Rohman, 2001 : 49) menambahkan, bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas “membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah”. Seperti tugas-tugas dalam hal mengarahkan sasaran atau obyek, penggunaan dana, ketepatan waktu, memanfaatkan

organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan, dan lain-lain.

Dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, Seorang ahli yang bernama Charles O. Jones mendasarkan diri pada konsepsi aktifitas-aktifitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: i) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; ii) interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; iii) aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Rohman, 2001 : 62).

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari sasaran kebijakan, aktivitas, kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses implementasi adalah suatu metode dengan menggunakan alat dan saran untuk menghasilkan dampak dari keputusan kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan dari hasil akhirnya, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang hendak diraih.

Implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan keputusan kebijakan. Implementasi juga berarti sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu (Rohman, 2009 : 70). Dimana pelaksanaan implementasi ini dibentuk melalui pengorganisasian sehingga membentuk suatu tugas-tugas yang berbeda

antar personel untuk menghasilkan kebijakan yang direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah.

Peter De Leon Linda De Leon mengemukakan bahwa teori-teori dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi yaitu generasi pertama yaitu memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi diantara kebijakan dan eksekusinya, lalu generasi yang kedua yaitu memahami implementasi kebijakan sebagai tugas yang diperintah dari atasan untuk birokrasi bawahnya yang sifatnya berupa kewajiban untuk dilaksanakan, dan generasi yaitu memahami bahwa proses keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh aktor/pelaksana kebijakan itu sendiri (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008 : 80).

Dalam semua kegiatan implementasi kebijakan, menurut Charles O. Jones (Rohman, 2009 : 43) menyatakan bahwa selalu ada dua aktor yang terlibat didalam implementasi yakni beberapa orang di luar para birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas implementasi dan para birokrat sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, disamping tugas-tugas implementasi.

Dua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan implementasi (*constituents*) serta pihak-pihak yang tergabung dalam kelompok kepentingan (*interest groups*). Unsur yang terkait dalam implementasi kebijakan adalah target group atau kelompok sasaran. Dimana kelompok sasaran itu adalah sekelompok orang yang menerima hasil dari aktivitas implementasi. Pihak-pihak yang tergabung dalam implementasi yaitu para pelaku dan pengguna kebijakan, dalam hal ini yaitu pembuat kebijakan yang terlibat dalam kelompok aktivitas kepentingan kebijakan dan juga kelompok sasaran pelaksana kebijakan yaitu birokrasi maupun kelompok yang melakukan aktivitas implementasi dari kebijakan dari kebijakan yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan.

## **2.4 Program Indonesia Pintar**

### **2.4.1 Pengertian**

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/miskin melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab sekolah.

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat PIP.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu

Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

#### **2.4.2 Dasar Hukum**

Pelaksanaan PIP berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/ Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar;
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015 Nomor: 023.03.1.666011/2015 tanggal 14 November 2014 beserta revisinya;

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP tahun 2015 Nomor: 023.03.1.666032/2015 tanggal 14 November 2014 beserta revisinya;
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015 Nomor: 023.12.1.666049/2015 tanggal 14 November 2014 beserta revisinya;
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2015 Nomor: 023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014 beserta revisinya.

### **2.4.3 Tujuan**

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2019-2024) yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah;
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;

#### 2.4.4 Sasaran

Sasaran PIP adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :

1. Penerima BSM 2014 Pemegang KPS;
2. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/ KKS/ KIP yang belum menerima BSM 2014;
3. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)non KPS;
4. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
5. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam;
6. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (droout) yang diharapkan kembali bersekolah;
7. Siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti:Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian(bidang Agrobisnis, Agroteknologi), Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman; peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Kecuali sasaran yang terdaftar pada SMK bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman, sasaran nomor 1 dan nomor 2 merupakan sasaran yang diprioritaskan.

#### 2.4.5 Pemanfaatan Dana

Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan sebagai berikut:

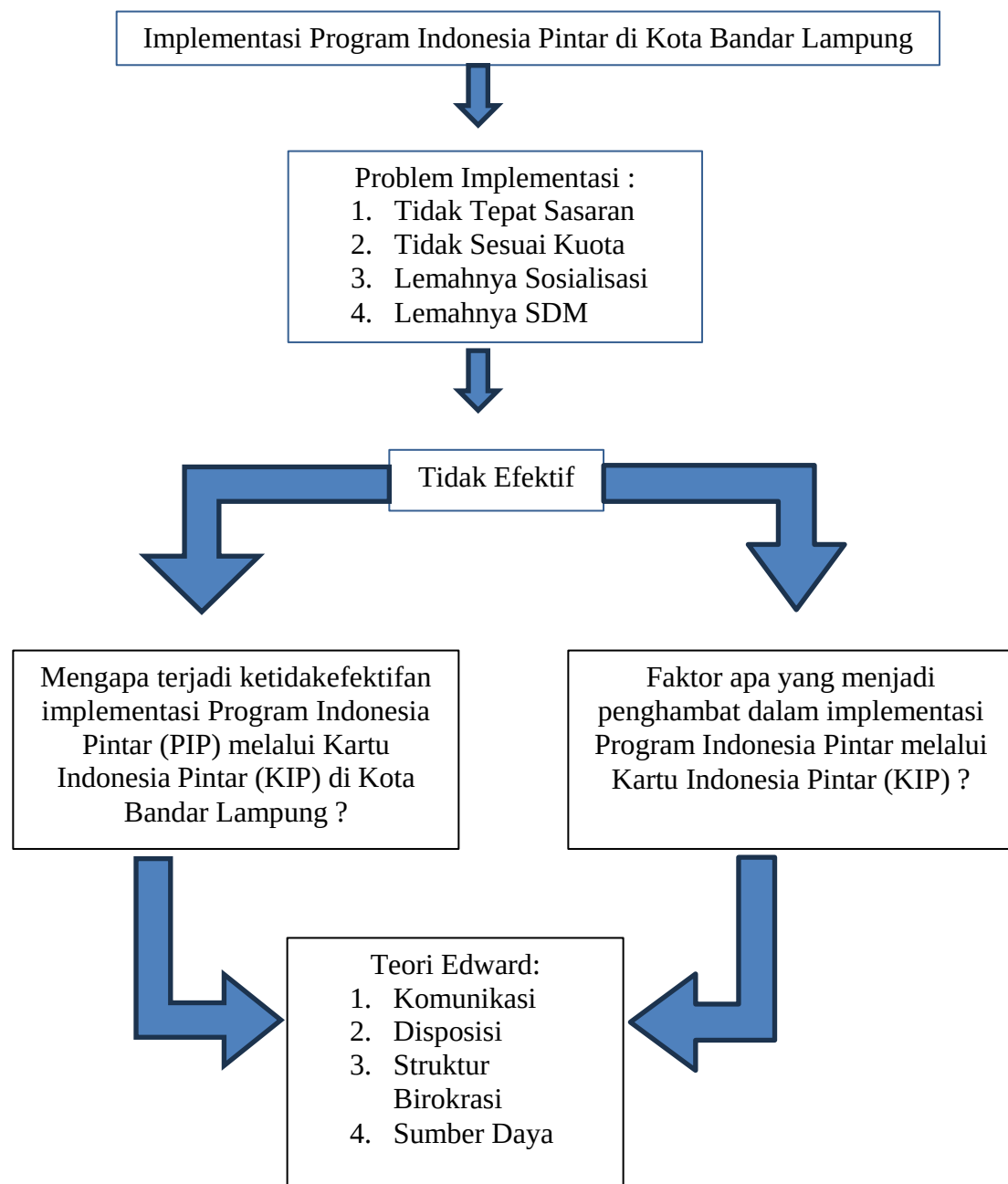
1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah;
3. Transportasi siswa ke sekolah;
4. Uang saku siswa ke sekolah;
5. Biaya kursus/les tambahan



## 2.5 Kerangka Pikir

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan upaya agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama. Permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah Implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada pelajar yang kurang mampu. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan ketidakefektifan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung dan Faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan tujuan penelitian ini menggunakan teori Edward. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapatlah dirumuskan dalam bagan kerangka pikir pada gambar berikut :



Gambar 2. Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang memberikan gambaran terkait masalah yang diteliti, dalam konteks penelitian ini untuk melihat bagaimanakah implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010 : 7) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Satori dan Komariah (2014 : 83) memaparkan penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasi yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif akan dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Jenis penelitian kualitatif lebih kepada penelitian mendalam dan akurat serta hasil dari penelitian akan lebih banyak berupa uraian deskriptif serta analisis sehingga pertanyaan dalam penelitian dapat terjawab.

Peneliti memilih metode tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena diharapkan dengan metode ini dapat memperoleh gambaran mengenai analisis terhadap penyebab dan factor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak terimplementasinya kebijakan publik, lebih lanjut penelitian ini juga diharapkan untuk dapat mengoptimisasi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Moleong (2006 : 132) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti untuk memilih data yang relevan. Hal ini disebabkan tidak semua data penting untuk dimasukkan dalam penelitian meskipun data tersebut menarik. Spradley (dalam Sugiyono, 2009 : 68) menyatakan bahwa *“A focused refer to a single cultural domain or a few related domains.”*

Hal tersebut menggambarkan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Maka penelitian ini berfokus pada masalah implementasi ketidakefektifan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada rumusan masalah yang pertama ini penulis menganalisis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Edwards III tentang empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni;

#### a Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku agar kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus disiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai yang diinginkan. Adapun indikator yang terdapat pada komunikasi kebijakan antara lain penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi dalam implementasi PIP.

#### b Sumber Daya

Faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, lebih lanjut lagi Edward III menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Jika para pelaksanaan suatu kebijakan tersebut yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif. Van Horn dan Van Matter juga menyatakan bahwa sumber daya bagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lainnya) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

#### c Sikap Birokrasi atau Pelaksana

Edward III menegaskan bahwa dalam keberhasilan pelaksanaan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan melakukannya tetapi juga ditentukan oleh

kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan suatu kebijakan dapat terwujud. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya, Mereka akan tahu bahwa kebijakn akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahami. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi terhadap diri pelaku kebijakan. Disposisi yang tinggi Edward III (1980) Van Horn & Van Matter (1974)

d Struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP (*standar operating procedure*) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut George C. Edwards III definisi dari empat faktor diatas dapat diuraikan bahwasanya komunikasi merupakan parameter seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu regulasi telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana aturan tersebut. Sumber daya merupakan wujud dari kekuatan maupun alat yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menjalankan implementasi kebijakan. Sikap birokrasi Sikap disini adalah sikap para

pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi merupakan kecenderungan suatu birokrasi untuk memilih suatu bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam memecahkan suatu permasalahan sosial yang dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Pemilihan fokus penelitian terkait kedua hal diatas dilakukan agar diketahui penyebab dan faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung. Faktor tersebut sebagai kajian penelitian dengan menggunakan teori George C. Edwards III definisi dari empat faktor diatas dapat diuraikan bahwasanya komunikasi merupakan parameter seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu regulasi telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana aturan tersebut. Setelah diketahui penyebab dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan maka diharapkan melalui penelitian ini akan didapatkan gambaran umum implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### **3.3 Jenis Data**

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2006: 157) menyatakan bahwa jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam audio tapes, pengambilan foto atau film. Jenis data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Sehingga, penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai (Nasution, 2006 : 80). Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian secara mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan program indonesia pintar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Jenis Data dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui wawancara kepada Pejabat pelaksana yang memiliki kewenangan terkait distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Orang yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurut Sugiyono (2012 : 137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada informan dan observasi terkait peristiwa-peristiwa yang terkait implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Bandar Lampung.

Data sekunder menurut Sugiyono (2012 : 137) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen regulasi, laporan keuangan, dan data terkait Program Indonesia Pintar.



### 3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu Kota di Provinsi Lampung yang memiliki isu ataupun fenomena masalah penelitian yang memiliki relevansi dengan bidang studi yang tengah peneliti jalankan saat ini. Dimana, peneliti berpendapat bahwa pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak sesuai dengan kriteria- kriteria yang telah di tentukan dengan ketentuan yang ada. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari hingga bulan April tahun 2023.

### 3.5 Informan

Menurut (Sugiyono, 2014 : 39) *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono.

Maka teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Sehingga dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Hal ini didasarkan dari respektif sugiyono terkait penyeleksian informan peneliti seperti yang telah peneliti jabarkan di atas. Sehingga, Dalam penelitian ini penulis memilih informan di Kota Bandar Lampung dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Dinas pendidikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu Mulyadi Syukri,M.Pd. (Kepala Seksi Pendidikan)
- b. Pengelola sekolah yaitu Astuti,M.Pd. (Kepala SMPN 29); Yoan Andriani,S.Pd. (Kepala SMPN 36); Chandra Saputra,S.Pd. (Kepala SMPN

22); Tahmin,M.Pd. (Kepala SMPN 13); Ratna Juwita,M.Pd. (Kepala SMPN 19)

- c. Pakar pendidikan yaitu Risa Afnimartinova,S.H,M.H.; Dr.Hj. Nirva Diana,M.Pd.; Ari Sofia,S.Psi.,M.A,P.Si.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti berangkat dari pandangan (Sugiyono, 2014 : 41) terkait penyeleksian informan penelitian yakni penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.6.1. Observasi**

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti (Hadi, 2014 : 21). Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi dimana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak.

Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai peneliti yaitu *observer* (periset) adalah orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu (Kriyantono, 2014 : 63). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kota Bandar Lampung.

Hasil observasi yang dapat peneliti sampaikan bahwa penyaluran program indonesia pinta belum efektif di kota Bandar Lampung, observasi ini peneliti lakukan pada tanggal 3 s.d. 15 Januari 2024. Selain itu ada juga faktor-faktor lain yang menghambat dalam pengimplementasian program ini.

### **3.6.2. Wawancara**

Teknik wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden berupa data yang dibutuhkan dalam penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara terencana sesuai dengan instrumen atau daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya (Sugiyono, 2014 : 75).

### **3.6.3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan data sekunder yang disimpan dalam bentuk file atau berupa dokumen seperti catatan konvensional maupun elektronik, tulisan, buku, laporan, majalah, notulen rapat, surat kabar, dan lain sebagainya (Suharso, 2009 : 65). Dokumentasi biasa digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih dipercaya atau menjadi faktor pendukung dalam melakukan penelitian. Dokumentasi diperlukan ketika sedang melakukan observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai faktor pendukung dalam penelitian.

## **3.7. Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

### **3.7.1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Emzir, 2010 : 48).

### **3.7.2. Data Display**

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya (Emzir, 2010 : 50).

### **3.7.3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)**

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Emzir, 2010 : 54).

#### **IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

##### **4.1 Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung, sehingga segala bentuk aktifitas perekonomian dan pemerintahan Provinsi Lampung bertumpu pada Kota yang berslogan *ragom gawi* yang bermakna gotong royong dan kerja sama. Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Perubahan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung menjadi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok sebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan

2. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara
3. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara
4. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2–5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung.

#### **4.2 Geografi Kota Bandar Lampung**

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 50 20' sampai dengan 50 30' Lintang Selatan dan 1050 28' sampai dengan 1050 37' Bujur Timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung memiliki andil dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi Nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 169,21 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk berdasarkan sensus pada tahun 2023 berjumlah 1.068.982 jiwa.

### **4.3 Keadaan Iklim dan Topografi Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung memiliki iklim tipe A yang berarti lembab sepanjang tahun. Curah hujan berkisar antara 2.257 –2.454 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 76-166 hari/tahun. Kelembaban udara Kota Bandar Lampung berkisar antara 60 sampai 85 persen dengan suhu udara 23-37 C. Kecepatan angin berkisar 2,78-3,80 knot dengan arah dominan dari Barat (November-Januari), Utara (Maret-Mei), Timur (Juni-Agustus) dan Selatan (September-Oktober) (Kota Bandar Lampung dalam Angka, 2022). Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari (Kota Bandar Lampung dalam Angka, 2022).

1. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang.
2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara
3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar TanjungKarang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
4. Teluk Lampung dan pulau–pulau kecil bagian Selatan.

### **4.4 Kependudukan Kota Bandar Lampung**

#### **4.4.1 Demografi**

Berikut adalah data yang menunjukkan persebaran penduduk kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin Tahun 2013-2023.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023**

| Tahun | Jumlah Penduduk |           | Jumlah    |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
|       | Laki-Laki       | Perempuan |           |
| 2013  | 446.978         | 438.385   | 885.363   |
| 2014  | 456.285         | 448.037   | 904.322   |
| 2015  | 465.673         | 457.502   | 923.175   |
| 2016  | 475.039         | 467.000   | 942.039   |
| 2017  | 484.215         | 476.480   | 960.695   |
| 2018  | 493.411         | 485.876   | 979.287   |
| 2019  | 502.418         | 495.310   | 997.728   |
| 2020  | 511.371         | 504.539   | 1.015.910 |
| 2021  | 520.078         | 513.725   | 1.033.803 |
| 2022  | 528.804         | 522.696   | 1.051.500 |
| 2023  | 537.396         | 531.586   | 1.068.982 |

Sumber : <https://bandarlampungkota.bps.go.id>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dengan jenis kelamin laki laki berjumlah 537.396 jiwa dan perempuan 531.586 jiwa .

#### 4.4.2 Lingkungan Hidup

Berikut banyaknya lingkungan menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

**Tabel 6. Jumlah Lingkungan dan RT Berdasarkan Kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023**

| No | Kecamatan            | Lingkungan | RT  |
|----|----------------------|------------|-----|
| 1  | Teluk Betung Barat   | 14         | 98  |
| 2  | Teluk Betung Timur   | 14         | 101 |
| 4  | Teluk Betung Selatan | 14         | 142 |
| 5  | Bumi Waras           | 12         | 149 |
| 6  | Panjang              | 20         | 227 |
| 7  | Tanjung Karang Timur | 11         | 109 |



|       |                      |     |       |
|-------|----------------------|-----|-------|
| 8     | Kedamaian            | 16  | 128   |
| 9     | Teluk Betung Utara   | 12  | 162   |
| 10    | Tanjung Karang Pusat | 14  | 150   |
| 11    | Enggal               | 13  | 120   |
| 12    | Tanjung Karang Barat | 16  | 137   |
| 13    | Kemiling             | 22  | 255   |
| 14    | Langkapura           | 11  | 79    |
| 15    | Kedaton              | 17  | 140   |
| 16    | Rajabasa             | 14  | 111   |
| 17    | Tanjung Senang       | 11  | 115   |
| 18    | Labuhan Ratu         | 12  | 101   |
| 19    | Sukarame             | 12  | 118   |
| 20    | Sukabumi             | 16  | 157   |
| 21    | Way Halim            | 16  | 184   |
| Total |                      | 287 | 2 783 |

Sumber : <https://bandarlampungkota.bps.go.id>

Berdasarkan tabel di atas Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dengan jumlah Lingkungan sebanyak 287 dan jumlah RT sebanyak 2.783.

#### 4.4.3 Tingkat Kegiatan

Berikut jumlah tingkat kegiatan masyarakat yang ada di Kota BandarLampung :

**Tabel 7. Tingkat Kegiatan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2023**

| Kegiatan              | Jenis Kelamin |           | Jumlah  |
|-----------------------|---------------|-----------|---------|
|                       | Laki-Laki     | Perempuan |         |
| Angkatan Kerja        | 311,018       | 200,668   | 511,686 |
| Bekerja/Working       | 289,138       | 186,106   | 475,244 |
| Pengangguran Terbuka  | 21,88         | 14,562    | 36,442  |
|                       |               |           |         |
| Bukan Angkatan Kerja  | 80,043        | 189,265   | 269,308 |
| Sekolah               | 45,401        | 46,418    | 91,819  |
| Mengurus Rumah Tangga | 22,043        | 137,083   | 159,126 |
| Lainnya               | 12,599        | 5,764     | 18,363  |

Sumber : <https://bandarlampungkota.bps.go.id>

Berdasarkan tabel diatas jumlah tingkat kegiatan masyarakat Kota Bandar Lampung dengan angkatan kerja sebanyak 511.686 jiwa dan bukan angkatan kerja berjumlah 269.308 jiwa.

#### 4.4.4 Wisata Kota Bandar Lampung

Terdapat banyak bentuk obyek wisata yang ada di Kota Bandar Lampung seperti wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya. Berikut bentuk obyek wisata budaya yang ada di Kota Bandar Lampung yakni sebagai berikut :

**Tabel 8. Wisata Budaya Kota Bandar Lampung**

| Obyek Wisata                           | Bentuk Kegiatan Wisata                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bunker Peninggalan Jepang              | Peninggalan sejarah                                                                                       |
| Goa Jajar                              | Peninggalan sejarah                                                                                       |
| Goa Cepat                              | Peninggalan sejarah                                                                                       |
| Kelanteng Vihara Thay Hin Bio          | Bangunan peribadatan umat Budha                                                                           |
| Masjid Tua Al-Anwar                    | Bentuk arsitektur dan nilai historisnya                                                                   |
| Pura Way Lunik                         | Bangunan peribadatan besar bagi umat Hindu                                                                |
| Monumen Krakatau                       | Monumen bersejarah dan taman                                                                              |
| Museum Lampung “Ruwa Jurai             | Museum dengan koleksi hasil kebudayaan masyarakat Lampung                                                 |
| Anjungan Lampung                       | Pusat Cindera Mata, Kuliner dan Kegiatan Seni Budaya, serta Replika Rumah Adat lima belas kabupaten/kota. |
| Rumah Adat Lampung Dalam Olok Gading   | Bentuk arsitektur tradisional Lampung                                                                     |
| Taman Budaya                           | Taman tempat rekreasi dan pertunjukan budaya                                                              |
| Lamban Balak Kedatun Keagungan Lampung | Rumah adat, dan perabot peninggalan Kerajaan Lampu                                                        |
| Kampung De Berow                       | Replika Kapal De Berow di Kampung De”Brow                                                                 |

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Situs Keratuan Dibalaw           | Peninggalan sejarah kerajaan Keratuan Balau di Kedamaian      |
| Reservoir PDAM Way Rilau         | Peninggalan sejarah Belanda di Imam Bonjol                    |
| Jembatan Beton                   | Peninggalan sejarah Belanda di Kecamatan Teluk Betung Selatan |
| Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | Bangunan Peninggalan Belanda                                  |
| Stasiun Kereta Api               | Peninggalan sejarah Belanda                                   |
| Rumah Adat Jajar Intan Kedamaian | Bentuk arsitektur tradisional Lampung                         |
| Gereja Marturia                  | Peninggalan sejarah Belanda                                   |
| Perkantoran PTPN VII             | Peninggalan sejarah Belanda                                   |

Sumber : <https://disparekraf.lampungprov.go.id/>

#### **4.5 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung**

##### **4.5.1 Profil Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung**

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Tanjung Karang Bandar Lampung. Kantor Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung yang dahulu disebut dengan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang Teluk Betung yaitu pada tahun 1976. Struktur organisasi pada saat itu sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0173/01/1983 tanggal 14 Maret 1983, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0363 /0 /1988 tanggal 20 Juli 1988 tentang perubahan keputusan Mendikbud RI Nomor : 0304/0/1984 yaitu pasal 82 butir 14. Tahun 1983 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang Barat Teluk Betung diubah menjadi Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Daerah Tk 11 Bandar Lampung (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, tambahan lembaran Negara Nomor 3254).

Kemudian pada tahun 1999 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung diubah namanya menjadi Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dengan didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab antara lain mengundang konsekuensi adanya perubahan dasar dari sisi kelembangan di daerah, maka dipandang perlu menata susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.

Proses pembangunan di Kota Bandar Lampung dilakukan di segala bidang salah satu diantaranya yakni bidang pendidikan dan kebudayaan yang terkoordinasi melalui Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Amir Hamzah Gotong Royong Tanjung Karang Pusat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung merupakan SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Karena itu dukungan seluruh sistem pada berbagai lini organisasi dan staf yang ada sangat menentukan bagi keberhasilan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Dalam upaya menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mempunyai empat bidang dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kota Bandar Lampung yakni Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pembinaan pada, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bidang Gedung dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang gedung dan perlengkapan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang PAUD dan pendidikan non formal dan informal. Bidang kebudayaan mempunyai tugas, melaksanakan promosi, pembinaan, pengembangan seni budaya.

#### **4.5.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung**

Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yakni :

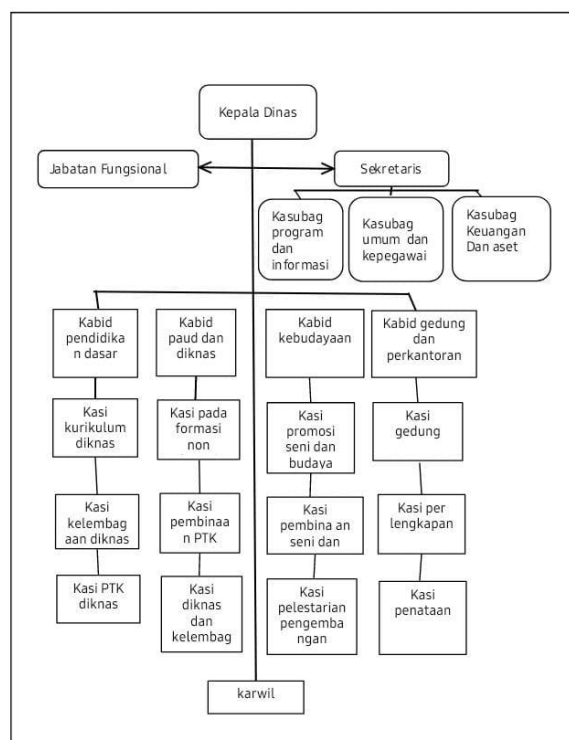
1. Visi :  
 “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul,  
 Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kemakmuran Rakyat”.
2. Misi
  - a. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.  
 Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.
  - b. Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.

#### **4.5.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung**

Sebuah struktur di dalam organisasi dibuat untuk memudahkan proses tata kelola SDM sekaligus menyusun strategi pencapaian suatu tujuan. Struktur organisasi yang

disebut juga sebagai garis hirarki merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Sehingga bisa diketahui siapa yang menjadi pimpinan, siapa yang bertanggung jawab atas bagian atau divisi tertentu, sekaligus mengetahui job desk masing-masing SDM.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut ini :



Sumber : <https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/>

**Gambar 4. Struktur Organisasi**

## **VI. PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Dari serangkaian pembahasan di bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti jabarkan guna menjawab rumusan masalah yang telah diterangkan di awal, yakni :

1. Ketidakefektifan Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar ( PIP ) melalui Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) di Kota Bandar Lampung. Pendistribusian KIP di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran komunikasi di Kota Bandar Lampung adanya penyampaian Program Indonesia Pintar. Tetapi sosialisasi yang di lakukan tidak kontinu sehingga informasi belum sepenuhnya di terima oleh siswa. Selain itu penyampaian sosialisasi oleh dinas pendidikan kepada salah satu perwakilan sekolah tujuan untuk penyampaian secara kongkret terkait kebijakan indonesia pintar tidak terlaksana.

Jumlah personil pada pengelola dana KIP masih kurang secara kuantitas sehingga kerap kali dalam menjalankan kegiatan pendistribusian KIP masih mengalami kendala kekurangan personil tidak hanya pada dinas tetapi juga pada sekolah yang menjalankan Program Indonesia Pintar.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program indonesia pintar melalui KIP. Dapat dilihat dari evaluasi Program KIP yang dilaksanakan setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khususnya pada mekanismenya. Hal tersebut mengakibatkan para pelaksana untuk terus melakukan pemahaman mekanisme baru setiap priodenya sehingga pelaksana program terkadang merasa kebingungan dengan adanya mekanisme baru.

Kesulitan dalam mengumpulkan kwitansi atau bukti penggunaan dana KIP yang telah digunakan oleh siswa sehingga sekolah terpaksa juga tidak

membuat laporan penggunaan dana tersebut dan sekolah tidak dapat mengetahui penggunaan dana oleh siswa apakah untuk keperluan pendidikan atau hal lain di luar pendidikan. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam implementasi KIP.

### 6.3 Saran

Berdasarkan pada penelitian dan beragam informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan mekanisme yang berubah disetiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pemerintah seharusnya membentuk tim monitoring Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena menurut hasil dari wawancara peneliti menjelaskan bahwa dari pihak sekolah maupun dinas tidak ada monitoring. Kemudian pemerintah hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
2. Bagi sekolah
  - a. Mengenai isu peningkatan mutu, diharapkan sekolah dapat melakukan pembinaan bagi siswa penerima KIP dengan intensif agar siswa penerima KIP juga mampu bersaing, sehingga secara tidak langsung kondisi tersebut membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut.
  - b. Sekolah juga diharapkan dalam memberikan dana KIP tidak hanya siswa saja yang menerima, namun juga turut mengundang orang tua siswa agar dapat menyaksikan bahwa anak mereka mendapatkan dana KIP. Meskipun sekolah sudah percaya dengan siswa, namun alangkah lebih baik apabila orang tua juga turut diundang.
  - c. Sekolah diharapkan dapat mengelola data, arsip atau dokumen sekolah dan selalu menyiapkan backup data.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Hasanah, (2020). "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Studi Di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi". *Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2022). *Berita Resmi Statistik Nomor 07/01/18/Th.XVI, 17 Januari 2022*. Diakses dari [Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung \(bps.go.id\)](http://bps.go.id). Pada Tanggal 11 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hidayat, Muchtar. 2012. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Hill, Michael dan Peter Hupe (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. London: Sage Publication. [Diakses 29 Januari 2016] <http://en.bookfi.net/book/1065459>.
- Idi, Abdullah. (2013). *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Illiya A.R. (2021). *Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus*. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Imanda, Raisa. N. (2016). *Strategi Peningkatan Quality of Urban Life (QoUL) dengan Pertimbangan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kota Tempat Tinggal*. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016.

- Intan Ayuni Pulungan. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Smp Negeri 1 Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J. Moleong, Lexy. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Joko Widodo. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis ProsesKebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Massam, Bryan. H. (2012). *Review Quality Of Life: Public Planning And Private Living*. Department of Geography and Division of Social Science Toronto.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabitier . 1983. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and company, USA.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA.
- Miftah S,R. (2022). *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Sorong Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Berbasis Dekstop*. INSECT, Vol.5 No.1, 2019, ISSN: 2476-9010
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,: Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nanang Fattah. (2012). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne (2014). *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Putri. 2020. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Jurnal Administrasi Negara SAWALA ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print) Volume 8 Nomor 2 2020, Halaman 224-232
- Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elek Media Komputindo.

- Rohman, Arif. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Rohman, Arif. (2014). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rohman, Arif.(2001). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu PendidikanUNY.
- Said Zainal Abidin. (2012). *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Santoso, Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Jurusan Politik & Pemerintahan UGM.
- Saroni, Muhammad. (2013). *Pendidikan untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sri. 2022. *Dampak Program Indonesia Pintar Terhadap Pendidikan Anak Pada Keluarga Miskin*. Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 312-320.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*.: Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, P. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofidan Praktis*. Jakarta : PT. Indeks.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Triana, Rochyati Wahyuni (2011). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
- Wahab, S. 2016. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-modelImplementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara Jakarta.
- Wirantiana. 2019. *Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Manajemen Pendidikan : e-ISSN 2549-9661 Volume: 6, No. 1, Halaman: 44-53

Yuni Marta Simbolon, Jeane Fellicia, Nur Adilah, & Muhamad Zidane Efendi. (2024). *ALOKASI ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 3(9), 103–114. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i9.3484>